

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Rabu, 7 Mei 2025
Wilayah	Kota Makassar



Pemkot Makassar Alihkan Rp9,7 M Anggaran Smart Sensor ke Infrastruktur Pulau



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih menyelesaikan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satu program terdampak adalah pengadaan Smart Sensor. Sebelumnya Smart Sensor menjadi program prioritas dalam APBD Pokok 2025. Smart sensor adalah alat untuk mengukur kualitas udara di Kota Makassar. Perangkat ini juga dirancang untuk memantau dan merespons berbagai parameter lingkungan secara realtime, termasuk kadar karbon, polutan, dan oksigen di udara. Kepala Bappeda Makassar, A. Zulkifli Nanda, menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai instansi pelaksana program tersebut.

Dari hasil rapat, disepakati bahwa pengadaan smart sensor ditiadakan. Anggarannya akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan Makassar. “Hasil rapat dengan Infokom memang sementara kita alihkan untuk infrastruktur pulau karena efisiensi juga,” ujar Zulkifli, Rabu (7/5/2025). Anggaran dialihkan mencapai Rp9,7 miliar, sebelumnya direncanakan untuk menghadirkan 43 unit smart sensor. Namun, dalam pemerintahan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham, anggaran tersebut difokuskan pada perbaikan wilayah kepulauan. Munafri mengaku prihatin melihat langsung kondisi infrastruktur saat berkunjung ke wilayah tersebut. Ia menyebut kondisi dermaga sudah tidak layak digunakan. Ia bersama rombongan juga meninjau fasilitas umum dan sosial, termasuk sekolah di Pulau Barrang Caddi. Di pulau itu hanya terdapat SD dan SMP.

Munafri berencana menggabungkan bangunan SD dan SMP dalam satu atap, lalu memanfaatkan satu bangunan lainnya untuk SMA agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan. “Setelah kita masuk, fasilitas yang ada ini sangat memprihatinkan. Saya sampaikan ke tim dan SKPD terkait untuk segera memperbaiki,” ujarnya. Ia juga sudah bertemu Gubernur Sulsel dan berharap ada dukungan pembangunan gedung SMA. Selain itu, Munafri menjanjikan dua perahu sebagai alat transportasi antar pulau. Rencana ini akan diperluas ke pulau-pulau terluar seperti Lumu-lumu dan Lanjukang. “Lalu lintas antar pulau harus terkoneksi. Awalnya dua perahu, berikutnya kita tambah, termasuk untuk pulau terluar,” jelasnya. Dermaga penyeberangan juga akan dibenahi, sebagai upaya mendukung wisata bahari di wilayah kepulauan. Menurutnya, infrastruktur baik akan membuka peluang usaha bagi warga, seperti rumah makan atau restoran dengan sajian laut. Ia menambahkan, pulau tak berpenghuni pun harus disiapkan dengan fasilitas dasar agar bisa menarik wisatawan. “Kalau kita mau eksplor wisata bahari, pulau-pulau yang ada harus siap infrastruktur agar mudah disinggahi. Ini bisa jadi tempat peristirahatan dan peluang usaha warga,” jelasnya. “Misalnya, sebelum ke Lanjukang, kita bisa istirahat dulu di Kodingareng atau Barrang Lompo. Di situ bisa makan siang. Ini harus dimaksimalkan,” sambungnya. Pemkot Makassar berencana mengalokasikan anggaran pembenahan infrastruktur pulau dalam perubahan APBD 2025. (*)